

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketahanan pangan berbasis rumah tangga merupakan isu penting dalam pembangunan wilayah dan desa (PWD), karena ketersediaan pangan pada tingkat nasional atau regional tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Menurut Sisha (2020), berbagai negara berkembang masih menghadapi tingkat kerawanan pangan rumah tangga yang tinggi meskipun secara agregat memiliki kapasitas produksi pangan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kerentanan rumah tangga terhadap guncangan iklim dan fluktuasi pasar. Kolog et al. (2023) dan Mengistu (2022) juga menegaskan bahwa ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan peningkatan produksi pangan skala makro.

Dalam literatur internasional, pendekatan ketahanan pangan berbasis rumah tangga (*household food security*) banyak dikaitkan dengan upaya peningkatan swasembada pangan pada skala mikro melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Menurut Mota et al. (2019), kepemilikan dan pemanfaatan lahan pekarangan, diversifikasi tanaman pangan, serta akses terhadap input dan penyuluhan pertanian memiliki pengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan rumah tangga di wilayah pedesaan Ethiopia. Temuan serupa dikemukakan oleh Aboaba et al. (2020) di Nigeria yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktif rumah tangga, khususnya perempuan dalam produksi pangan domestik berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan mengurangi ketergantungan pada pasar. Dengan demikian, penguatan produksi pangan berbasis rumah tangga menjadi salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam konteks pembangunan pedesaan di negara berkembang.

Dalam konteks Indonesia, Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat dipahami sebagai bentuk implementasi kebijakan yang sejalan dengan konsep *household food security* yang berkembang dalam kajian

internasional. Meskipun istilah KRPL merupakan nomenklatur kebijakan nasional, substansi program ini menekankan optimalisasi pekarangan rumah tangga, diversifikasi pangan, serta pemberdayaan perempuan sebagai pengelola utama pangan keluarga. Menurut Bahiru et al. (2023), faktor pendidikan, kepemilikan aset, dan kapasitas kelembagaan lokal merupakan determinan utama keberhasilan ketahanan pangan rumah tangga. Selain itu, Shelembe et al. (2025) menekankan bahwa sistem pangan rumah tangga perlu dipahami sebagai bagian dari sistem pembangunan wilayah yang lebih luas, karena keberlanjutannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat lokal. Oleh karena itu, pembahasan KRPL dalam kerangka PWD relevan untuk menempatkan program ini sebagai strategi penguatan ketahanan pangan berbasis rumah tangga.

Salah satu program yang dirancang pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan berbasis rumah tangga adalah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Berdasarkan hasil penelitian Purwantini (2016) KRPL berperan penting dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan. Dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan di pekarangan, keluarga dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasar. Studi di Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa penerapan KRPL mampu meningkatkan konsumsi energi dan protein rumah tangga serta mengurangi pengeluaran untuk konsumsi pangan.

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan program strategis dalam Pembangunan Wilayah dan Desa (PWD) yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan rumah tangga melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnaningsih & Lestari (2021) Secara sosial, KRPL mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok wanita tani, dalam kegiatan pertanian pekarangan. Hal ini memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal. Dari sisi ekonomi, KRPL berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga melalui penjualan hasil panen dan penghematan pengeluaran untuk pangan. Secara lingkungan, KRPL mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan

pengelolaan limbah rumah tangga menjadi kompos, yang berkontribusi pada kelestarian lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dalam konteks Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), istilah kawasan tidak hanya merujuk pada kumpulan pekarangan rumah tangga yang berdekatan secara geografis, tetapi juga mencerminkan suatu unit spasial berbasis komunitas yang memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya lokal. Konsep kawasan dalam perspektif pembangunan wilayah pedesaan menekankan adanya interaksi antar rumah tangga, kelembagaan lokal, serta dukungan tata kelola nagari yang membentuk suatu sistem produksi dan konsumsi pangan lokal yang terintegrasi (Healey, 2004; Rodríguez-Pose, 2013). Dengan demikian, kawasan dalam KRPL dipahami sebagai klaster sosial-ekologis yang memungkinkan terjadinya kolektivitas tindakan, pembelajaran bersama, serta penguatan modal sosial dalam pengelolaan pekarangan secara berkelanjutan (Pretty, 2003). Pemahaman kawasan secara spasial dan kelembagaan ini penting karena keberhasilan KRPL tidak hanya ditentukan oleh aktivitas individual rumah tangga, tetapi oleh sinergi antar aktor dalam suatu wilayah yang memiliki kesatuan fungsi pembangunan.

Pada Tahun 2018, Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kembali meluncurkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dalam rangka mempercepat penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Manfaatnya sangat besar, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk itu, Pemerintah telah menganjurkan agar memanfaatkan setiap jengkal tanah termasuk lahan tidur, galengan, maupun tanah kosong yang tidak produktif.

Secara kebijakan, KRPL telah lama menjadi program nasional dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 2 (tanpa kelaparan), tujuan 5 (kesetaraan gender), tujuan 12 (produksi dan konsumsi berkelanjutan), dan tujuan 15 (ekosistem daratan). Program ini juga relevan dengan implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, yang menekankan pembangunan berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, KRPL dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam pembangunan wilayah pedesaan.

Di Indonesia, khususnya di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, program KRPL berhasil meningkatkan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif. Program ini berhasil mengintegrasikan sumber daya lokal, seperti tanaman pangan dan tanaman obat, yang sesuai dengan pola konsumsi masyarakat setempat. Studi oleh Purnaningsih dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa keberlanjutan program ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, terutama kelompok wanita tani, serta adanya peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan pengeluaran untuk pangan (Purnaningsih & Lestari, 2021).

Nagari Panti Selatan, yang terletak di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam ketahanan pangan dan gizi masyarakat, yang berdampak pada tingginya angka balita stunting. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan bergizi serta pengembangan sumber protein hewani dan nabati, KRPL membantu memastikan ketersediaan dan keberagaman pangan di tingkat rumah tangga. Dengan meningkatnya akses terhadap makanan bergizi dan pola konsumsi yang lebih seimbang, risiko kekurangan gizi pada balita dapat berkurang, sehingga program KRPL menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung penurunan angka stunting secara berkelanjutan di masyarakat.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berpotensi memperkuat ketersediaan pangan bergizi di tingkat rumah tangga, mendukung pemberdayaan kelompok wanita tani, serta secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap penurunan angka stunting di wilayah tersebut. Melalui implementasi KRPL, masyarakat dapat mengoptimalkan sumber daya lokal dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan skala kecil di pekarangan rumah. Selain itu, program ini juga selaras dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan.

Meskipun berbagai program ketahanan pangan berbasis rumah tangga telah diimplementasikan di banyak negara berkembang, sejumlah studi menunjukkan bahwa keberlanjutan program tersebut sering menghadapi kendala pada aspek partisipasi, kelembagaan, dan rasa kepemilikan masyarakat. Menurut Uphoff

(1992), program pembangunan yang dirancang secara *top-down* cenderung menghasilkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan eksternal dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga, Mota et al. (2019) dan Bahiru et al. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi pangan sangat ditentukan oleh sejauh mana rumah tangga dan komunitas lokal terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber daya pangan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata pada desain program, melainkan pada lemahnya kapasitas dan peran masyarakat sebagai aktor utama pembangunan pangan.

Untuk memahami sejauh mana suatu program pembangunan mampu mencapai tujuan dan mempertahankan keberlanjutannya, diperlukan suatu proses evaluasi program. Evaluasi program merupakan proses sistematis untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan suatu program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan (Stufflebeam, 2003; Rossi et al., 2019). Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model evaluasi ini menilai program secara komprehensif mulai dari kesesuaian konteks program dengan kebutuhan masyarakat, kecukupan sumber daya yang digunakan, kualitas pelaksanaan program, hingga hasil yang dicapai. Melalui pendekatan evaluasi ini, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan implementasi program KRPL di tingkat lokal, termasuk aspek partisipasi masyarakat, kelembagaan kelompok, serta keberlanjutan kegiatan setelah dukungan program berkurang.

Pendekatan revitalisasi program berbasis masyarakat menjadi relevan sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut. Revitalisasi dalam konteks ini dipahami sebagai upaya penguatan kembali fungsi program melalui penyesuaian strategi, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Menurut Chambers (1997), pemberdayaan yang efektif hanya dapat dicapai apabila masyarakat memiliki kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang memengaruhi kehidupan mereka. Studi-studi tentang ketahanan pangan rumah tangga juga menunjukkan bahwa program yang menempatkan komunitas sebagai subjek, bukan

objek pembangunan, memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan karena didukung oleh modal sosial, pengetahuan lokal, dan mekanisme kolektif di tingkat desa (Shelembe et al., 2025).

Program KRPL menjadi penting untuk menjawab kesenjangan antara konsep ideal dan realitas di lapangan. Revitalisasi dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai sekadar pengulangan program yang telah berjalan, melainkan sebagai upaya penguatan kembali fungsi dan efektivitas program melalui peningkatan peran masyarakat sebagai subjek utama, optimalisasi kelembagaan lokal, serta penyesuaian strategi pelaksanaan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Dengan pendekatan tersebut, revitalisasi diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan program serta memperkuat kontribusi KRPL dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Dengan adanya revitalisasi, KRPL diharapkan tidak lagi dipandang sekadar sebagai proyek jangka pendek, melainkan sebagai gerakan berkelanjutan yang mampu mendukung kemandirian pangan rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan desa/nagari secara terpadu.

Dalam konteks ini, konsep Pengembangan Wilayah Desa (PWD) menjadi sangat relevan sebagai kerangka revitalisasi KRPL. PWD menekankan integrasi pembangunan berbasis potensi lokal, partisipasi masyarakat, dan tata kelola kolaboratif, sehingga mampu mengatasi kelemahan struktural dalam implementasi KRPL selama ini. Melalui pendekatan PWD, revitalisasi KRPL tidak hanya menyentuh aspek teknis pertanian, tetapi juga membangun fondasi sosial, kelembagaan, dan ekonomi yang mendukung keberlanjutan program secara jangka panjang. Dengan demikian, KRPL dapat berkembang menjadi strategi terpadu dalam pembangunan desa yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KRPL di Nagari Panti Selatan, mengevaluasi keberhasilan dan hambatan implementasi sebelumnya, serta merumuskan strategi revitalisasi berbasis konteks lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan penguatan program KRPL di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

## **B. Rumusan Masalah**

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan inisiatif pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal. Program ini dikembangkan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) dan PKK, untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, buah, dan tanaman obat keluarga (TOGA). Selain menghasilkan bahan pangan bergizi bagi konsumsi rumah tangga, KRPL juga mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui penjualan hasil pekarangan. Secara konseptual, KRPL tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga sebagai model pertanian berkelanjutan di tingkat rumah tangga yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari dan pelestarian lingkungan.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada dasarnya memiliki peluang besar untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan pembangunan nagari. Pemanfaatan pekarangan dapat menjadi sumber pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), sementara keberadaan kelembagaan lokal seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) dan PKK memberi potensi penggerak utama dalam pelaksanaan program. Selain itu, dukungan kebijakan nagari melalui RPJM Desa serta agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) membuka ruang bagi penguatan kemandirian pangan berbasis masyarakat.

Jika dilihat dari kondisi demografis, peluang pengembangan KRPL di Nagari Panti Selatan semakin terbuka lebar. Berdasarkan data kependudukan tahun 2025 Nagari Panti memiliki 4.122 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 13.053 jiwa, sehingga terdapat basis sasaran yang cukup besar untuk mengembangkan program ketahanan pangan berbasis rumah tangga, khususnya dengan menyangkar ibu rumah tangga sebagai pengelola utama pekarangan. Selain itu, keberadaan 26 Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan total 642 anggota menjadi modal sosial yang sangat penting. KWT dapat dijadikan mitra strategis sekaligus aktor penggerak dalam implementasi KRPL, karena lebih mudah dijangkau, memiliki pengalaman kolektif, serta terbukti berperan aktif dalam pengelolaan pangan di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Implementasi KRPL di Nagari Panti Selatan sejak 2024 mencapai 4 lokasi yang tersebar di Tanjung Medan, Ujung Padang, Ampang Gadang dan Pasar Mapun dengan bentuk dan tampilan yang bervariasi antar kawasan. Pada saat ini peserta program KRPL merupakan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hingga saat ini terdapat 5 KWT yang menjadi peserta M-KRPL di Nagari Panti Selatan.

Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai strategi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan, termasuk melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), implementasi program ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam pelaksanaan program KRPL di Nagari Panti Selatan belum menunjukkan keberlanjutan yang optimal. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi di antaranya adalah sistem pengawasan dan pendampingan yang belum maksimal, cara pandang masyarakat terhadap program yang belum berubah, kurangnya kemandirian dan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan jangka panjang, variasi capaian antar lokasi pelaksanaan program, belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pendukung seperti rumah bibit.

Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan KRPL di Nagari Panti Selatan adalah masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap pendampingan dan bantuan pemerintah. Temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa frekuensi kegiatan kelompok dan pemanfaatan fasilitas KRPL menurun seiring berkurangnya pendampingan, serta terdapat variasi capaian antar lokasi pelaksanaan program, yang mengindikasikan belum terbentuknya kemandirian dan kelembagaan masyarakat secara optimal. Ketika kegiatan pendampingan dilakukan secara intensif, masyarakat antusias mengelola pekarangan, rumah bibit, dan aktivitas kelompok. Namun, saat pendampingan mulai jarang atau bantuan berhenti, aktivitas masyarakat juga menurun drastis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat belum terbentuk, dan keberlanjutan program masih sangat bergantung pada intervensi eksternal.

Dalam konteks pembangunan wilayah desa, Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sejalan dengan upaya pemerintah nagari dalam meningkatkan kemandirian masyarakat berbasis potensi lokal. Pemanfaatan

pekarangan rumah tangga untuk produksi pangan tidak hanya mendukung ketahanan pangan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi desa melalui pengurangan pengeluaran rumah tangga, peluang usaha kecil, serta penguatan kelembagaan lokal seperti KWT dan PKK. Dengan demikian, keberhasilan KRPL tidak hanya berdampak pada level rumah tangga, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan desa secara lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan, pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sosial ekonomi, termasuk pada sektor ketahanan pangan. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi teknis penyediaan pangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan keluarga dan komunitas lokal melalui penguatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pekarangan secara mandiri dan berkelanjutan. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, fungsi pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi, sehingga capaian program masih lebih menonjol sebagai kegiatan berbasis proyek dibandingkan sebagai proses penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Program KRPL secara ideal memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar, berorganisasi, dan mengambil keputusan dalam mengelola lahan pekarangan, menanam tanaman bergizi, dan mengatur distribusi serta pemanfaatannya dalam skala rumah tangga. Melalui pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT), PKK, serta pelatihan teknis, program ini sebenarnya menjadi wadah pembelajaran sosial dan ekonomi yang memperkuat kapasitas masyarakat khususnya perempuan sebagai pelaku utama dalam ketahanan pangan rumah tangga. Namun dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait partisipasi masyarakat, kesinambungan pendampingan, dan pemanfaatan fasilitas pendukung program. Meskipun demikian, secara konseptual KRPL memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai program berbasis masyarakat karena menempatkan rumah

tangga, khususnya perempuan yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT), sebagai aktor utama dalam pengelolaan pangan. Oleh karena itu, KRPL memerlukan strategi revitalisasi yang menekankan penguatan pemberdayaan masyarakat, di mana partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran dalam kegiatan, tetapi juga keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan inovasi lokal. Pendekatan ini menegaskan bahwa KRPL perlu dikembangkan sebagai program berbasis komunitas yang mendorong masyarakat menjadi subjek utama pembangunan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan di tingkat nagari.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah:

- 1 Bagaimana pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Nagari Panti Selatan?
- 2 Model apa yang sesuai untuk merevitalisasi program KRPL di Nagari Panti Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

- 1 Mengevaluasi pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
- 2 Merumuskan model revitalisasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut. :

- 1 Pemerintah Nagari Panti Selatan : Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pemerintah nagari dalam Menyusun dan menerapkan strategi untuk pelaksanaan program KRPL di Nagari Panti Selatan
- 2 Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Selanjutnya : Bermanfaat sebagai sumber kepustakaan serta sebagai acuan atau bahan referensi bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan lingkup strategi.